



PENERBIT ANDI®

Pajak Berganda ? Tidak Lagi !



**Pedoman Mudah
dan
Praktis Memahami
Tax Treaty**

TAX

Djoko Muljono



Tax Treaty merupakan salah satu cara untuk mengatur pemajakan yang dilakukan oleh negara-negara yang penduduknya mempunyai penghasilan dari negara lain. Pengaturan pemajakan dimaksudkan agar penghasilan yang diperoleh penduduk dari suatu negara pada negara lain tersebut pengenaan pajaknya tidak dikenakan dua kali atau bahkan jangan sampai terjadi atas penghasilan tersebut tidak dipajaki pada kedua negara bersangkutan.

Tax Treaty berkaitan dengan Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai penghasilan pada negara sumber penghasilan. Untuk menghindari pemajakan dua kali di negara domisili Wajib Pajak Luar Negeri tersebut maka perlu dilakukan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara kedua negara bersangkutan.

Buku ini menjelaskan perlakuan Wajib Pajak Luar Negeri maupun Wajib Pajak Dalam Negeri yang mempunyai penghasilan dari negara lain, termasuk pula dengan kegiatan ekspor maupun impor. Disertai juga dengan berbagai penyebab dan cara menghilangkan pajak berganda, contoh penerapan P3B, dan berbagai permasalahan yang terjadi atas perlakuan ketentuan perpajakan yang dikenakan terhadap Wajib Pajak Luar Negeri termasuk berlakunya dan berakhirnya P3B.

Pajak Berganda ? Tidak Lagi !

Pedoman Mudah & Praktis
Memahami **Tax Treaty**

Penerbit ANDI
Jl. Beo 38-40 Yogyakarta
Telp. (0274) 561881 Fax. (0274) 588282
e-mail: penerbit@andipublisher.com
website: www.andipublisher.com

Dapatkan Info Buku Baru, Kirim e-mail: info@andipublisher.com



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	1
Perbedaan Wajib Pajak Luar Negeri dengan Dalam Negeri	1
Dasar Pengenaan Pajak Wajib Pajak Luar Negeri	2
Dasar Pengenaan Pajak Wajib Pajak Luar Negeri dengan Undang-undang Pajak Penghasilan	2
Dasar Pemotongan PPh bagi Wajib Pajak Luar Negeri.....	2
Kewajiban Pemotong PPh Pasal 26.....	13
Dasar Pengenaan Pajak Wajib Pajak Luar Negeri dengan Perjanjian Pengenaan Pajak Berganda.....	13
Pemotongan Pajak WPLN Tidak Dilakukan.....	14
Wajib Pajak Luar Negeri Berubah Status Menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri	15
BAB II EKSPOR	17
Barang atau Jasa yang Diekspor	17
Pajak yang Terkait Ekspor.....	17
Pajak Pertambahan Nilai pada Ekspor.....	17
Pajak Penjualan Barang Mewah pada Ekspor	20
Pungutan Ekspor	20
Bea Keluar	28
Ekspor dalam Kaitannya dengan P3B.....	40
BAB III IMPOR	41
Pelaksana Impor	41
Importir.....	41
Indentor	41
Pajak Berkaitan Impor.....	42
Pajak Penghasilan pada Impor	42
Pajak Pertambahan Nilai pada Impor.....	45
Bea Masuk	49
Reimpor.....	65

BAB IV	TIMBULNYA PAJAK BERGANDA	67
	Azas Pemajakan Terhadap Penghasilan.....	67
	Azas Domisili	67
	Azas Sumber	67
	Timbulnya Pajak Berganda.....	67
	Model Tax Treaty	68
	United Model Tax Convention	68
	OECD Model Tax Convention.....	68
	Pola Tax Treaty	68
	Ruang Lingkup Tax Treaty.....	71
BAB V	CARA MENGHILANGKAN PAJAK BERGANDA	87
	Metode Exemption	87
	Metode Credit	88
	Cara Penghindaran Pajak Berganda di Indonesia.....	88
	Cara Penghindaran Pajak Berganda Terhadap Wajib Pajak Dalam Negeri di Indonesia.....	88
	Cara Penghindaran Pajak Berganda Terhadap Wajib Pajak Luar Negeri di Indonesia .	96
	Cara Penghindaran Pajak Berganda pada P3B.....	96
	Non Discrimination.....	97
BAB VI	PENERAPAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DALAM P3B.....	99
	Ketentuan P3B Bukan untuk Subjek Pajak Dalam Negeri	99
	Persyaratan Administratif Harus Dipenuhi oleh WPLN dalam Pemanfaatan P3B	99
	Tidak Menyalahgunakan Penerapan P3B.....	117
BAB VII	PENYALAHGUNAAN P3B.....	119
	Transaksi yang Tidak Mempunyai Substansi Ekonomi	119
	Transaksi yang Dilakukan Memenuhi Legal Form Tetapi Tidak Mempunyai Substansi Ekonomi	119
	Beneficial Owner.....	119
	Bukan Termasuk Beneficial Owner.....	120
	Beneficial Owner pada P3B.....	121
BAB VIII	RESIDENT COMPETENT AUTHORITY.....	125
	Resident.....	125
	Resident of A Contracting State pada P3B	126
	Surat Keterangan Domisili.....	126
	Berlakunya SKD	128
	Negara Domisili	128
	Hak Pemajakan Wajib Pajak Badan Luar Negeri.....	128

	Competent Authority	129
BAB IX	PERMANENT ESTABLISHMENT	133
	Bentuk Usaha Tetap di Indonesia	133
	Penaan Pajak BUT di Indonesia	134
	Bentuk Usaha Tetap pada P3B	135
	Bentuk Usaha yang Diakui Sebagai BUT	136
	<i>Time Test</i> Menjadi BUT	136
	Penaan Pajak pada BUT	139
	<i>Income Tax</i>	140
	<i>Branch Profit Tax</i>	141
BAB X	ASSOCIATED ENTERPRISES	147
	Hubungan Istimewa di Negara Indonesia	147
	Pengakuan Adanya Hubungan Istimewa	147
	Penaan Pajak pada Hubungan Istimewa	148
	Hubungan Istimewa pada P3B	149
	Pengakuan Adanya Hubungan Istimewa	149
BAB XI	PASSIVE INCOME	153
	Dividen	153
	Penaan PPh Atas Dividen bagi Wajib Pajak Luar Negeri di Indonesia	153
	Penaan Pajak Atas Dividen Menurut P3B	154
	Besarnya Pajak Atas Dividen Berdasarkan P3B	155
	Interest	158
	Penaan Pajak Atas Bunga Diterima Wajib Pajak Luar Negeri Sesuai UU PPh	158
	Pajak Atas Bunga Sesuai Ketentuan P3B	158
	Penaan Pajak Atas Bunga Menurut P3B	159
	Besarnya Pajak Atas Bunga Menurut P3B	159
	Pajak Atas Bunga pada BUT Sesuai P3B	161
	Pajak Atas Bunga pada Hubungan Istimewa Sesuai P3B	162
	Bank Sentral	162
	Royalti	163
	Pajak Atas Royalti yang Diterima WPLN di Indonesia	163
	Pajak Atas Royalti yang Diterima WPLN Menurut P3B	164
	Tarif PPh Royalti Sesuai P3B	165
	Pajak Atas Royalti pada Hubungan Istimewa pada P3B	167
	<i>Deemed Royalty</i>	167

<i>Capital Gain</i>	168
<i>Capital Gain</i> dalam Undang-Undang PPh.....	168
<i>Capital Gain</i> Menurut P3B.....	169
Pengalihan Harta Tak Bergerak pada BUT	169
Pengalihan Harta Bergerak pada BUT.....	170
Keuntungan Terkait Pengoperasian Pesawat Udara.....	170
<i>Withholding Tax</i> di ASEAN.....	170
Modal Harta Tak Bergerak pada P3B	171
BAB XII INTERNATIONAL TRAFFIC DAN BUSINESS PROFITS	173
<i>International Traffic</i> Sesuai Undang-Undang PPh	173
Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.....	173
Perusahaan Pelayaran dan Penerbangan Luar Negeri.....	173
Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri	174
<i>International Traffic</i> pada P3B	175
<i>Shipping and Air Transport</i>	175
Penghasilan Pelayaran dan Penerbangan di Negara Sumber.....	175
<i>Business Profits</i>	176
BAB XIII PERSONAL SERVICES.....	183
<i>Independent Personal Services</i>	183
Perbedaan <i>Time Test</i> pada UU PPh dengan P3B.....	183
<i>Time Test Independent Personal Service</i>	184
Jasa di Indonesia Dilakukan Penduduk Negara <i>Treaty Partner</i>	185
Penghasilan Artis dan Atlet	186
Penghasilan Guru dan Peneliti	186
Penghasilan Pelajar dan Pemagang	188
<i>Dependent Personal Service</i>	190
Penghasilan Gaji dan Upah	191
Penghasilan <i>Director Fee</i>	191
Penghasilan <i>Pensions</i> dan <i>Annuities</i>	191
<i>Government Service</i>	192
Penghasilan Lainnya.....	192
BAB XIV MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE.....	193
Perbedaan Antara <i>Legal Form</i> dengan <i>Economic Substance</i>	193
Pertukaran Informasi	195
Pertukaran Informasi Sesuai Undang-Undang di Indonesia.....	195
Prosedur Pertukaran Informasi	196
Perlakuan Jawaban Hasil Pertukaran Informasi	196

	Pertukaran Informasi pada P3B.....	197
	Pejabat Diplomatik dan Konsuler.....	198
BAB XV	BERLAKU DAN BERAKHIRNYA P3B.....	199
	Berlakunya Persetujuan.....	199
	Berakhirnya Persetujuan.....	202
	<i>Protocol</i>	204